



**RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 2017**

WATANSOPPENG  
2016

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng sebagai suatu SKPD dapat menyusun dan menyelesaikan "*Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017*" sebagai amanat atas Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD.

Rencana Kerja (Renja SKPD) ini sebagai Rencana Kerja Tahun Peralihan disusun berdasarkan pada pelaksanaan yang mengarah pada program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021. Dokumen ini difungsikan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan pada Sekretariat Daerah kabupaten Soppeng untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Disadari sepenuhnya sebagai manusia biasa bahwa penyusunan dokumen ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat diharapkan. Dan atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rencana Kerja (**RENJA SKPD**) Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng ini dapat tersusun, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Semoga dokumen ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Wilayah Kabupaten Soppeng pada umumnya dan meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng di masa depan pada khususnya.

Watansoppeng,  
SEKRETARIS DAERAH,



**Ir. H. SUGIRMAN DJAROPI, MS.**

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip. : 19570715 198303 1 032

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....</b>	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	10
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>13</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	13
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD.....	17
3.3. Program dan Kegiatan .....	18
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>42</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Mencermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan dengan salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah, sebagai tindak lanjutnya pada masing-masing SKPD adalah penyusunan Rencana Kerja SKPD yang mengacu pada RPJMD, hal ini dimaksudkan agar kerangka pembangunan yang telah disusun menjadi satu kesatuan perencanaan yang utuh, konsisten dan berkelanjutan. Selanjutnya sebagaimana hal tersebut dan untuk mengembangkan potensi pemerintahan dan pembangunan daerah agar lebih berkualitas, Sekretariat daerah kabupaten Soppeng berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan.

Adapun Proses penyusunannya memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Soppeng.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025.
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;



27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
35. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### A. Maksud

Rencana Kerja (Renja SKPD) tahun 2017 ini disusun untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng yang dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menjamin agar terciptanya sinergitas kebijakan dan sinkronisasi program tahunan serta menjadi pedoman dan acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

#### B. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD) tahun 2017 bertujuan sebagai alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Disamping itu juga ditujukan sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan Renstra tahun 2016-2021

### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja SKPD) Sekretariat Daerah Tahun 2017 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, memuat Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD; Analisis Kinerja

Pelayanan SKPD; Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD; Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan, memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi; Tujuan dan Sasaran Renja SKPD; Program dan Kegiatan.

Bab IV Penutup, memuat tentang Penutup dan Lampiran

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra SKPD yang telah dibuat, tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan ataupun program yang telah disusun akan terlihat pada evaluasi hasil pelaksanaannya yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sebagai Tahun awal dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021, maka tidak ada proses evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaiannya.

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng sebagai SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dengan tugas pokok tersebut, kinerja dari pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng dapat dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka mengukur jenis

dan mutu pelayanan dasar dan IKK yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Disamping menggunakan SPM proses analisis dan pengukuran kinerja terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan yang menjadi tupoksinya dapat pula menggunakan *analisis kebutuhan pelayanan* sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok yang disebutkan sebelumnya sesuai dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 11/PER-BUP/IX/2008 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng, Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
5. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum dan peraturan perundang-undangan, keuangan peralatan/ perlengkapan dan tata usaha di lingkungan Sekretariat Daerah.
6. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan kemasyarakatan.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian Tupoksi Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng di atas maka diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari :

1. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, hukum dan peraturan perundang-undangan, keuangan peralatan/perlengkapan dan tata usaha di lingkungan Sekretariat Daerah.
2. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pada lingkup Sekretariat Daerah.
3. Melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD.
4. Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Daerah dan seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng dapat digambarkan berdasarkan telaahan sesuai dengan pengamatan dan kondisi yang mencakup faktor-faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan-pelayanan yang ada selama ini, Adapun isu-isu penting yang sangat mendesak untuk ditangani oleh Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Kualitas SDM Aparatur;
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung tugas;
3. Rendahnya Penegakan Disiplin Aparatur;
4. Kapasitas SDM Aparatur kurang memadai;
5. Penataan pedoman yang berkaitan dengan standar, prosedur mekanisme kerja maupun yang berkaitan dengan standar, prosedur mekanisme pelayanan belum berjalan dengan baik;
6. Masih rendahnya kesadaran dan disiplin pejabat dalam memahami jabatan dan tanggungjawab yang diembannya.

Beberapa isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang dapat berpengaruh dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Faktor Peluang :

1. Masih terbentang luas kesempatan aparat untuk membenahi diri dengan mengikuti Diklat-diklat, Bimtek-bimtek dalam upaya peningkatan kualitas SDM Aparatur, dengan lebih banyak memberikan kesempatan kepada staf sehingga pada gilirannya akan membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi atasan.
2. Adanya peningkatan dana untuk pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pengetahuan baik dalam bentuk pendidikan formal maupun peningkatan keterampilan, melalui bimtek, diklat-diklat dan sebagainya.
3. Tingginya komitmen pimpinan untuk berupaya membenahi sarana dan prasarana pendukung tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Tingginya perhatian pimpinan untuk berupaya merumuskan sistem dalam rangka pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
5. Masih adanya sebagian besar pegawai menyadari akan tugas dan tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi yang diemban, sehingga masih terlihat motivasi kerja yang tinggi.

b. Faktor Ancaman

1. Belum sepenuhnya tercipta alur-alur mekanisme koordinasi baik antar bagian maupun lintas SKPD.
2. Masih lemahnya pengawasan, dan belum sepenuhnya dilakukan penerapan sanksi terhadap aparat yang kurang disiplin.
3. Tingkat kesejahteraan aparat belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga cenderung pegawai masih ada yang cenderung mencari

pekerjaan-pekerjaan sampingan demi untuk menambah penghasilan mereka.

4. Staf belum sepenuhnya memahami dengan jelas penjabaran tupoksinya.
5. Pelaksanaan Tugas dan fungsi belum dilengkapi dengan pedoman dan standar operasional prosedur.



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Terhadap Kebijakan Nasional, Prioritas pembangunan nasional merupakan penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang merupakan penjabaran Visi Misi Presiden dan Wakil Preside terpilih yang secara garis besar memuat visi pembangunan nasional 2015-2019 yaitu: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong-royong. Kemudian diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 tersebut disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pembangunan Nasional tahun 2017 direncanakan sebagai keberlanjutan upaya yang telah dimulai sebelumnya dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dengan menerapkan tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 khususnya pada Pengelolaan desentralisasi dan otonomi daerah yang memiliki sasaran dalam hal meningkatnya kapasitas keuangan pemerintahan daerah, meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dan meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah. Adapun arah kebijakannya dalam rangka mendukung implementasi desentralisasi asimetris

terfokus pada upaya penguatan tata kelola pemerintah daerah dalam aspek kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah serta penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat.

Arah Kebijakan pada peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dimaksudkan untuk makin meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat, dengan menempuh strategi:

- (1) Peningkatan penetapan APBD tepat waktu;
- (2) Penyerapan DAK dalam APBD sesuai dengan Petunjuk Teknis;
- (3) Peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- (4) Penetapan Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu;
- (5) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan Daerah;
- (6) Pelaksanaan Peningkatan Sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah;
- (7) Harmonisasi Regulasi Pusat-Daerah;
- (8) Penataan Daerah; dan
- (9) Penguatan kapasitas aparatur Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah.

Disamping itu terdapat kebijakan lain yang perlu diadakan perkuatan antara lain:

1. Pengembangan Kapasitas Keuangan Pemerintahan Daerah Dalam rangka mengembangkan kapasitas keuangan pemerintahan daerah, maka kebijakan pembangunan tahun 2017 adalah: (a) Meningkatnya kemampuan fiskal daerah; (b) Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran keuangan daerah; serta (c) Meningkatnya kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen sumber daya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan berintegritas, kebijakan pembangunan tahun 2017, adalah:
  - (a) Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan aparatur pemerintah daerah;
  - (b) Terselenggaranya sistem pendidikan dan pelatihan manajemen pembangunan, kependudukan, keuangan daerah dan kepemimpinan pemerintah daerah; serta
  - (c) Terlaksananya standarisasi, sertifikasi, dan kerjasama diklat pemerintahan dalam negeri.
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah Dalam rangka meningkatkan pembangunan kelembagaan pemerintahan daerah 2017, kebijakan pembangunan tahun 2017 adalah tersusunnya restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD); terlaksananya penataan kewenangan di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah; terlaksananya penataan daerah; terjalinnnya kerjasama daerah yang baik; penyusunan harmonisasi peraturan perundangan; terciptanya sinergi di bidang perencanaan maupun penganggaran di pusat maupun daerah; penataan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan; terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik; terlaksananya efektivitas pelaksanaan otonomi khusus dan penguatan kapasitas kepala daerah dan DPRD.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan kebijakan tersebut, baik desentralisasi maupun otonomi daerah memerlukan sejumlah kerangka pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaannya:

- (1) Pendanaan untuk pengembangan atau inovasi pelayanan public atau peningkatan belanja infrastruktur perlu memanfaatkan peran swasta, hibah, dan masyarakat;
- (2) Berdasarkan Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendanaan dana transfer khususnya DAK harus mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Terhadap Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan, kebijakan pembangunan Tahun 2017 diarahkan kepada pencapaian sasaran program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018, namun tetap memperhatikan analisa kelayakan dan rasionalisasi pencapaiannya. Untuk mendukung capaian sasaran tersebut, maka disusun program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan secara bersama-sama dan saling terkait, saling mendukung satu dengan lainnya, di mana keberhasilan pelaksanaan salah satu arah kebijakan juga turut menentukan keberhasilan agenda kebijakan lainnya. Oleh sebab itu, maka setiap tahun kebijakan yang tertuang dalam RPJMD dijabarkan ke dalam dokumen RKPD sebagai dokumen yang sifatnya lebih operasional.

Adapun fungsi pokok dari RKPD Provinsi Sulawesi Selatan antara lain:

1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat seluruh kebijakan publik.
2. Menjadi pedoman dalam menyusun Renja-SKPD dengan melihat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu Tahun kedepan.
3. Menciptakan kepastian arah kebijakan dan Program Kegiatan Prioritas, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan dan
4. Menjadi acuan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Menyesuaikan dengan Dokumen Renstra 2011-2015, maka tujuan Renja Sekretariat Daerah tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya koordinasi dengan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan perangkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
2. Terciptanya sistim administrasi pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, terbuka dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat;

3. Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas dan dapat diukur dari tahun ke tahun;
4. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Adapun Sasaran Renja Sekretariat Daerah tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya Koordinasi dengan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Pelaksanaan Mekanisme dan Alur Pembangunan Perekonomian Daerah untuk Peningkatan Pelayanan Prima;
2. Terwujudnya pengembangan Sistem Administrasi Pemerintahan yang Handal, Demokratis, Profesional, Bersih, Terbuka dan Partisipatif dan Tanggap Terhadap Aspirasi Masyarakat;
3. Terciptanya Kualitas Pelayanan Kepegawaian dan Masyarakat, Pengelolaan Anggaran serta Penciptaan Budaya Kerja Aparatur yang Baik dan Berkeadilan;
4. Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Daerah yang handal dan bertanggung jawab;
5. Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Sekretariat Daerah.

### **3.3. Program dan Kegiatan Prioritas SKPD**

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

#### **PROGRAM PENINGKATAN KEDINASAN KDH DAN WKDH**

- Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat
- Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen /Luar Negeri
- Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

- Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

#### PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH

- Penyusunan Rencana Kerja Kelembagaan
- Evaluasi Jabatan
- Penyusunan Kompetensi Jabatan
- Evaluasi Kelembagaan serta Tugas dan Fungsi
- Proses Pelaksanaan Ketatalaksanaan
- Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
- Penyusunan Road Map Program Reformasi Birokrasi
- Pengawasan Melekat (Waskat)

#### PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK

- Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik
- Penguatan Kinerja Pelayanan Publik
- Penilaian Kinerja Pelayanan Publik
- Inovasi Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik

#### PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

- Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
- Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah
- Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

#### PROGRAM PEMBERIAN PERTIMBANGAN PENDAPAT DAN PENDAMPINGAN HUKUM KELUARGA MISKIN

- Kegiatan Layanan Bantuan Hukum Magi Masyarakat Miskin

#### PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kegiatan Fasilitasi Sosialisai Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Pengelolaan Data LHKPN

Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

- Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan
- Kegiatan Kajian peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan keserasian antara peraturan Perundang-undangan Daerah
- Publikasi peraturan perundang-undangan berupa sosialisasi peraturan tentang rokok/pajak tembakau
- Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Pelayanan

#### PROGRAM KOORDINASI DAN FASILITASI KEAGAMAAN DAN PENANGGULANGAN NARKOBA

Fasilitasi Pelasanaan Pemberangkatan/ Pemulangan Jamaah haji

Fasilitasi pelasanaan perayaan hari-hari besar keagamaan

Fasilitasi pelasanaan/keikutsertaan MTQ & STQ

Fasilitasi Pelaksanaan Festifal Anak Shaleh

Pengembangan nilai budaya LASQI

Peningkatan nilai-nilai keagamaan

Fasilitasi Penanganan Narkoba melalui sistem pencegahan penyalagunaan & pemberantasan gelap Narkoba (P4GN)

#### PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

- Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah

- Kegiatan Penyuluhan Pertanahan Di Kecamatan

#### PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN

- Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

#### PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROTOKOLERAN



Orientasi Keprotokoleran

Peningkatan Kegiatan Keprotokoleran

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN  
MEDIA MASSA

- Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah
- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

- Sosialisasi Pemahaman Persandian
- Pelaksanaan Tata Kelola jaminan Keamanan Informasi Menggunakan Persandian
- Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah daerah kabupaten Soppeng
- Sosialisasi Pemahaman Persandian
- Fasilitasi Penyelenggaraan Persandian Pemerintah daerah

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM DAN PROMOSI INVESTASI

- Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dibidang Penanaman Modal dengan instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
- Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
- Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah

PROGRAM PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
DAERAH

- Pengendalian dan Peningkatan Data Pembangunan se- Kabupaten Soppeng
- Pembinaan jasa konstruksi/Kabupaten

PROGRAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG  
DAN JASA

- Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa (ULP)

- Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (LPSE)
- Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM EVALUASI KINERJA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kegiatan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)

Kab. Soppeng

Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati

Soppeng

Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kab. Soppeng

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Soppeng

Evaluasi Mandiri Berbasis Kinerja

PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEMDA

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

- Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
- Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Pengumpulan Informasi hasil Tembakau Ilegal
- Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
- Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Harga Khusus Padi, Jagung dan Kedelai
- Fasilitasi dan Koordinasi Perhubungan darat dan data Pameran Pemerintah Daerah
- Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
- Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan
- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Soppeng

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Soppeng

Kegiatan Koordinasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Kerjasama di Kabupaten Soppeng

- Fasilitasi dan Koordinasi Wilayah Perbatasan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kegiatan Koordinasi Pembakuan Unsur Rupabumi Kabupaten Soppeng

Fasilitasi Agen/ Pangkalan BBM dan LPG Bersubsidi

Koordinasi Optimalisasi Capaian Target Produksi Pertanian

Koordinasi Teknis Penertiban Ternak Berkeliaran

Koordinasi dan pembinaan tambang

Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan RPH dan Lalu lintas Ternak

Fasilitasi Pengaturan Alih Fungsi Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Legislatif, DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro, kecil dan Menengah di Pedesaan

- Fasilitasi Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda

Fasilitasi dan koordinasi masalah keamanan dan pencegahan tindak kriminal

- Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi

Fasilitasi Pelaksanaan Sekolah Sehat

Fasilitasi dan Koordinasi Masalah Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi

Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan KB

Fasilitasi dan koordinasi Pengendalian Zoonosis

#### PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
- Penyediaan Operasional Mess Pemda Jakarta
- Penyediaan Jasa Perkantoran
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati

#### PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

- Pemeliharaan Rutin Berkala -Peralatan Studio
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
- Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman, Taman, Pagar, Tempat Parkir

#### PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Administrasi Kepegawaian
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangpundangan

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN  
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah

Adapun rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan, target capaian kinerja serta kebutuhan dana/pagu indikatif untuk tahun 2017 dan prakiraan maju tahun 2018 yang akan dilakukan oleh Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1.6	SOSIAL								
1.6.3	PROGRAM PEMBERIAN PERTIMBANGAN PENDAPAT DAN PENDAMPINGAN HUKUM KELUARGA MISKIN	Warga Miskin yang mendapat bantuan hukum		100	100.724.800			100	110.797.280
	Kegiatan Layanan Bantuan Hukum Magi Masyarakat Miskin	Warga Miskin yang mendapat bantuan hukum	Kab. Soppeng	100	100.724.800	APBD	Bag. Hukum	100	110.797.280
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.4	PERTANAHAN								
2.4.1	PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Jumlah Aset Pemda yang tersertifikat		20	2.675.000.000			20	2.185.000.000
	- Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Lahan Aset Pemda Yang Tersertifikat	Kab. Soppeng	2 bidang	75.000.000	APBD	Bagian Adm. Pemum	2 bidang	75.000.000
	Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Pengadaan Tanah Untuk Umum	Kab. Soppeng	1 bidang	2500000000	APBD	Bagian Adm. Pemum	1 bidang	2000000000
	Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah	Jumlah Lahan Masyarakat Yang Tersertifikat	Kab. Soppeng		0	APBD	Bagian Adm. Pemum		0
	- Kegiatan Penyuluhan Pertanahan Di Kecamatan	Terlaksananya penyuluhan Pertanahan di Kecamatan	8 Kec	8 Kec	100000000	APBD	Bagian Adm. Pemum	8 Kec	110000000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.2	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	Jumlah Kasus tanah yang diselesaikan		10	50.000.000			10	55.000.000
	- Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kab. Soppeng	10 Kasus	50.000.000	APBD	Bagian Adm. Pemum	10 Kasus	55.000.000
2.12	PENANAMAN MODAL								
2.12.1	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM DAN PROMOSI INVESTASI	Jumlah investor (PMDN/P		30	180.000.000			35	275.000.000
	- Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dibidang Penanaman Modal dengan instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Terlaksananya Koordinasi & Kerjasama dibidang P.Modal dg instansi Pemerintah dg BUD	Watansoppeng			APBD	Bagian Adm. Perekonomian		
	- Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terciptanya Promosi Produk Unggulan Daerah	Makassar,dll	4 kali	100.000.000	APBD	Bagian Adm. Perekonomian	4 kali	150.000.000
	- Kegiatan Fasilitas Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah	Tersusunnya Data Peta Potensi Daerah untuk para investor menanamkam investasinya	Watansoppeng	1 kali	80000000		Bagian Adm. Perekonomian	1 kali	125000000
2.15	PERSANDIAN								
2.15.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN	Presentase Informasi yang diamankan		100	150.000.000			100	150.000.000
	- Sosialisasi Pemahaman Persandian	- Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	Watansoppeng	50	50.000.000	APBD	Humas dan Protokol	50	50.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Pelaksanaan Tata Kelola jaminan Keamanan Informasi Menggunakan Persandian	- Jumlah Jenis Informasi di tingkat Kab/Kota yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan	Watansoppeng	10	30000000		Humas dan Protokol	10	30000000
	- Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah daerah kabupaten Soppeng	- Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting yang harus diamankan	Watansoppeng	57	35000000		Humas dan Protokol	57	35000000
	- Fasilitasi Penyelenggaraan Persandian Pemerintah daerah	-Jumlah OPD yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	Watansoppeng	38	35000000		Humas dan Protokol	38	35000000
4	URUSAN LAINNYA								
4.4	PEMERINTAHAN UMUM								
4.4.1	PROGRAM PENINGKATAN KEDINASAN KDH DAN WKDH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100	2.937.550.000			100	3.231.305.000
	- Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Terwujudnya Pelayanan Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati	Kab. Soppeng	22	987.250.000	APBD	Bag. Umum	25	1.085.975.000
	- Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen /Luar Negeri	Terwujudnya Pelayanan Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Kab. Soppeng	20	1.110.340.000	APBD	Bag. Umum	22	1.221.374.000



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Kab. Soppeng	102	671.660.000	APBD	Bag. Umum	107	738.826.000
	- Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terwujudnya Kunjungan Kerja/Inspeksi Bupati dan Wakil Bupati	Kab. Soppeng	175	168.300.000	APBD	Bag. Umum	182	185.130.000
4.4.2	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM EVALUASI KINERJA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Opini Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		CC	177000000			CC	194700000
	Kegiatan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) Kab. Soppeng	Tersedianya data EKPOD Kabupaten Soppeng	Kab. Soppeng	1 Dok	30000000		Bagian Adm. Pemum	1 Dok	33000000
	Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Soppeng	Tersedianya buku laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Soppeng	Kab. Soppeng	1 dok	45000000		Bagian Adm. Pemum	1 dok	49500000
	Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kab. Soppeng	Tersedianya buku laporan penyelenggaraan pemerintahan Kab. Soppeng		1 dok	50000000		Bagian Adm. Pemum	1 dok	55000000
	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Soppeng	Buku Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.	Kab. Soppeng	1 dok	52000000		Bag. Ortala	1 dok	57200000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.4.3	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH	Persentase SKPD yang Kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan		90	413.206.915			100	506.892.356
	- Penyusunan Rencana Kerja Kelembagaan	Rancangan Produk-produk hukum daerah berupa peraturan daerah dan peraturan Bupati/dokumen informasi jabatan.	Kec. Lalabata	0	0	APBD	Bag. Ortala	0	0
	- Evaluasi Jabatan	Dokumen hasil evaluasi jabatan.	Kec. Lalabata	37	53427216		Bag. Ortala	37	56098576
	- Penyusunan Kompetensi Jabatan	Dokumen penyusunan syarat jabatan.	Kec. Lalabata	1	53427216		Bag. Ortala	1	58769937
	- Evaluasi Kelembagaan serta Tugas dan Fungsi	Dokumen hasil evaluasi Kelembagaan dan fungsi.	Kec. Lalabata	2	53427216		Bag. Ortala	2	56098576
	- Proses Pelaksanaan Ketatalaksanaan	Pedoman tata naskah, pakaian dinas, mekanisme dan produksi kerja.	Kec. Lalabata	0	0		Bag. Ortala	1	80000000
	- Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Dokumen hasil perumusan, pengolahan revisi jabatan dan beban kerja & evaluasi	Kec. Lalabata	2	111.350.872	APBD	Bag. Ortala	0	111.350.872
	- Penyusunan Road Map Program Reformasi Birokrasi	Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi dan PMPRB	Kec. Lalabata	1	81.574.395	APBD	Bag. Ortala	1	81.574.395
	- Pengawasan Melekat (Waskat)	Jumlah Aparat Obyek Pengawasan	Kec. Lalabata	1	60000000		Bag. Ortala	1	63000000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.4.4	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEMDA	Persentase SKPD yang terfasilitasi		100	1.842.857.875			100	2.074.866.385
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Kec. Lalabata	24	50.429.325	APBD	Bag. Ortala	24	52.950.791
	- Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Jumlah Sosialisasi tentang ketentuan dibidang cukai	Kab.Soppeng	1 kali	60.500.000	APBD	Bagian Adm. Perekonomian	1 kali	66.550.000
	- Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Pengumpulan Informasi hasil Tembakau Ilegal	Data Peningkatan Koordinasi,Pembinaan dan Monitoring Kebijakan DBHCHT dan tersusunnya Data Tembakau Ilegal	8 Kecamatan	4 Dokumen	202.400.000	APBD	Bagian Adm. Perekonomian	4 Dokumen	222.640.000
	- Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	pengembangan industri hasil tembakau melalui penerapan Good Manufacturing Practcies (GMP)	Watansoppe ng	1 kali	110.000.000	APBD	Bagian Adm. Perekonomian	1 kali	121.000.000
	- Fasilitasi dan Koordinasi Perhubungan darat dan data Pameran Pemerintah Daerah	tersedianya laporan hasil kegiatan		5 kali	37.400.000	APBD	Bag. Adm. Pembangunan	5 kali	41.140.000
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan dan Kelurahan	8 Kec	8 kali	97.000.000	APBD	Bagian Adm. Pemum	8 kali	100.000.000
	Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan	Terlaksananya PATEN di Kecamatan	8 Kec	1 Kec	60000000		Bagian Adm. Pemum	1 Kec	66000000
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Soppeng	Tersedianya data penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten Soppeng	Kab. Soppeng	1 Dok	15000000		Bagian Adm. Pemum	1 Dok	16000000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Soppeng	Tersedianya data penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Soppeng	Kab. Soppeng	1 Dok	15000000		Bagian Adm. Pemum	1 Dok	16000000
	Kegiatan Koordinasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Kerjasama di Kabupaten Soppeng	Terlaksananya koordinasi kependudukan, catatan sipil dan kerjasama di Kabupaten Soppeng	Kab. Soppeng	1 Dok	15000000		Bagian Adm. Pemum	1 Dok	16000000
	Fasilitasi dan Koordinasi Wilayah Perbatasan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Tersedianya data wilayah perbatasan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Di Kabupaten Soppeng	Kab. Soppeng	1 Dok	37.000.000	APBD	Bagian Adm. Pemum	1 Dok	40.000.000
	Kegiatan Koordinasi Pembakuan Unsur Rupabumi Kabupaten Soppeng	Terlaksananya koordinasi pembakuan unsur rupabumi di setiap Kecamatan	8 Kec	8 Kec	80.000.000		Bagian Adm. Pemum	8 Kec	82.000.000
	Fasilitasi Agen/ Pangkalan BBM dan LPG Bersubsidi	Penertiban dan Pengawasan Harga, distribusi BBM dan LPG Bersubsidi	Kab. Soppeng	1 dok	37.000.000		Bag. Adm. SDA	1 dok	40.700.000
	Koordinasi Optimalisasi Capaian Target Produksi Pertanian	Rumusan Kebijakan Upaya percepatan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	Kab. Soppeng	1 dok	50.000.000	APBD	Bag. Adm. SDA	1 dok	55.000.000
	Koordinasi Teknis Penertiban Ternak Berkeliaran	Data regulasi terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat serta pencegahan potensi penyakit rabies	Kab. Soppeng	1 dok	35.000.000	APBD	Bag. Adm. SDA	1 dok	38.500.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan pembinaan tambang	Penertiban Usaha tambang golongan C	Kab. Soppeng	1 dok	20000000		Bagian Adm. SDA	1 dok	22000000
	Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan RPH dan Lalu lintas Ternak	Rumusan Kebijakan Peningkatan PAD dan Jaminan Produk peternakan yang ASUH	Kab. Soppeng	1 dok	25000000		Bag. Adm. SDA	1 dok	27500000
	Fasilitasi Pengaturan Alih Fungsi Lahan Pertanian Tanaman Pangan	Rumusan Kebijakan mempertahankan lahan pertanian dan penerapan RDTR	Kab. Soppeng	1 dok	23000000		Bag. Adm. SDA	1 dok	25300000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur	Kab. Soppeng	1	40000000		Bagian Adm. Kemasyarakatan	1	120000000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Legislatif, DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Terpilihnya Anggota Legislatif, DPD dan Presiden/Wakil Presiden periode 2019-2024	Kab. Soppeng	-	-		Bagian Adm. Kemasyarakatan	-	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026	Kab. Soppeng	-	-		Bagian Adm. Kemasyarakatan	-	-
	- Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro, kecil dan Menengah di Pedesaan	Terpenuhinya Kebutuhan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah	Kab. Soppeng	20	88.616.275	APBD	Bagian Adm. Kemasyarakatan	30	97.477.550
	- Fasilitasi Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda	Tersosiali	Kab. Soppeng	1 Dok	121.360.855	APBD	Bagian Adm. Kemasyarakatan	1 Dok	133.496.940
	Fasilitasi dan koordinasi masalah keamanan dan pencegahan tindak kriminal	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi masalah keamanan dan pencegahan tindak kriminal	Kab. Soppeng	8	444.596.845	APBD	Bagian Adm. Kemasyarakatan	8	489.056.529

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan - perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi	Tersusunnya data tentang Penanggulangan Inflasi Daerah	Watansoppe ng	2 dokumen	70.000.000	APBD	Bagian Adm. Perekonomian	2 dokumen	77.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Sekolah Sehat	Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat	8 kec	3	42.905.800	APBD	Bag. Adm. Kesra	3	42.905.800
	Fasilitasi dan Koordinasi Masalah Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi	Jumlah Koordinasi Masalah Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi	8 kec	2	13.521.650	APBD	Bag. Adm. Kesra	2	13.521.650
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, KB dan Agama	Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, KB dan Agama	8 kec	2	4.518.500	APBD	Bag. Adm. Kesra	2	4.518.500
	Fasilitasi dan koordinasi Pengendalian Zoonosis	Jumlah Sosialisasi Pengendalian Zoonosis	8 kec	8	47.608.625	APBD	Bag. Adm. Kesra	8	47.608.625
4.4.5	PROGRAM KOORDINASI DAN FASILITASI KEAGAMAAN DAN PENANGGULANGAN NARKOBA	Terfasilitasinya kegiatan kesejahteraan rakyat, Keagamaan dan Penanggulangan Narkoba		100	1.238.106.075			100	1.238.106.075
	Fasilitasi Pelasanaan Pemberangkatan/ Pemulangan Jamaah haji	tersedianya transportasi jamaah haji dari sopp ke asrama haji	8 kec	250	426.227.850	APBD	Bag. Adm. Kesra	250	426.227.850
	Fasilitasi pelasanaan perayaan hari-hari besar keagamaan	terlaksananya hari besar islam	8 kec	6	199.534.875	APBD	Bag. Adm. Kesra	6	199.534.875
	Fasilitasi pelasanaan/keikutsertaan MTQ & STQ	tercapainya pelaksanaan MTQ & STQ	8 kec	1	117.199.000	APBD	Bag. Adm. Kesra	1	117.199.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Festival Anak Shaleh	terlaksananya Festival anak Saleh	8 kec	1	137.391.600	APBD	Bag. Adm. Kesra	1	137.391.600
	Pengembangan nilai budaya LASQI	Terlaksananya Festival LASQI	8 kec	2	78.533.750	APBD	Bag. Adm. Kesra	2	78.533.750
	Peningkatan nilai-nilai keagamaan	Terlaksananya Kajian Agama untuk peningkatan nilai-nilai keagamaan	8 kec	12	93.624.300	APBD	Bag. Adm. Kesra	12	93.624.300

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Penanganan Narkoba melalui sistem pencegahan penyalagunaan & pemberantasan gelap Narkoba (P4GN)	Penyuluhan Penanganan Narkoba	8 kec	16	185.594.700	APBD	Bag. Adm. Kesra (2016) Bag. Adm. Kemasyarakatan (2017-2021)	16	185.594.700
4.4.6	PROGRAM PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya Dokumen Pelaporan data capaian fisik dan pembinaan jasa konstruksi		Ada	146.894.000			Ada	161.583.400
	Pengendalian dan Peningkatan Data - Pembangunan se- Kabupaten Soppeng	tersedianya laporan dan capaian realisasi fisik proyek/kegiatan pembangunan	Kab. Soppeng	1 dok	34.840.190	APBD	Bag. Adm. Pembangunan	1 dok	38.324.209
	- Pembinaan jasa konstruksi/Kabupaten	Tercapainya pembinaan jasa konstruksi tingkat kabupaten	Watansoppeng	1 dok	112.053.810	APBD	Bag. Adm. Pembangunan	1 dok	123.259.191
4.4.7	PROGRAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu		100	663.704.360			100	730.074.796
	- Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa (ULP)	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang ditender	Watansoppeng	105 Pkt	273.530.730	APBD	Bag. Adm. Pembangunan	110 Pkt	300.883.803
	- Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (LPSE)	Persentase Tender yang dilaksanakan secara elektronik	Watansoppeng	100%	302.360.520	APBD	Bag. Adm. Pembangunan	100%	332.596.572
	- Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa	Tersedianya data evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa yang ditender	Watansoppeng	1 dok	87.813.110	APBD	Bag. Adm. Pembangunan	1 dok	96.594.421

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.4.8	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Tertanganinya Kasus Pengaduan di lingkup Pemerintah Daerah		2	341.191.125			2	375.310.238
	- Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terlaksananya Proses Tindak Lanjut Hasil Temuan	Kab. Soppeng	85	77.224.216	APBD	Bag. Hukum	88	84.946.638
	- Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah	Tertanganinya Kasus Pengaduan di lingkup Pemerintah Daerah	Kab. Soppeng	2	225.354.800	APBD	Bag. Hukum	2	247.890.280
	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya Sosialisasi Pengawasan TP4D	Kab. Soppeng	12	38.612.109	APBD	Bag. Hukum	12	42.473.320
4.4.9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROTOKOLERAN	terlaksananya aktifitas keprotokolan daerah		100	174.811.807			100	192.292.987
	Orientasi Keprotokoleran	Jumlah Peserta Orientasi	Watansoppeng	45	49.619.625	APBD	Humas dan Protokol	50	54.581.587
	Peningkatan Kegiatan Keprotokoleran	-Lancarnya Setiap Acara Melalui Peningkatan Keprotokoleran	Dalam & Luar Kab. Soppeng	50	125.192.182	APBD	Humas dan Protokol	55	137.711.400
4.4.10	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Jumlah Updating informasi daerah ke website Pemda (Hari)		150	596.310.193			150	655.941.212
	- Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Terwujudnya Dokumentasi Kegiatan Pemerintah, Peliputan serta Pembuatan Klipping Pers	Watansoppeng	24	126.252.693	APBD	Humas dan Protokol	36	138.877.962



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Mempermudah /Memperlancar Informasi dan Potensi Perkembangan Kegiatan kepada Kab.Soppeng kepada Masyarakat	Watansoppeng	1 Website	332.887.500	APBD	Humas dan Protokol	1 Website	366.176.250
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Data dan informasi kepada masyarakat	Kab. Soppeng	7 pkt jasa & 5 pkt Barang	137.170.000	APBD	Humas dan Protokol	8 pkt jasa & 6 pkt Barang	150.887.000
4.4.11	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah RANPERDA		16	858.851.375			16	944.736.513
	Kegiatan Fasilitasi Sosialisai Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Pemahaman 100 org terhadap Undang-undang HAM	Kab. Soppeng	150	92691667		Bag. Hukum	150	101960834
	Kegiatan Pengelolaan Data LHKPN	Tersedianya data LHKPN di Kabupaten Soppeng	Kab. Soppeng	100	46345833		Bag. Hukum	100	50980416
	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Terciptanya Rancangan PERDA	Kab. Soppeng	16	235.839.890	APBD	Bag. Hukum	16	259.423.879
	- Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Kelompok Kadarkum	Kab. Soppeng	30	197.726.760	APBD	Bag. Hukum	30	217.499.436
	- Kegiatan Kajian peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi dan keserasian antara peraturan Perundang-undangan Daerah	Terselenggaranya Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yg berlaku	Kab. Soppeng	100	109.697.225	APBD	Bag. Hukum	100	120.666.948
	- Publikasi peraturan perundang-undangan berupa sosialisasi peraturan tentang rokok/pajak tembakau	Terselenggaranya pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rokok kepada masyarakat/pemangku kepentingan	Kab. Soppeng	400	110.000.000	APBD	Bag. Hukum	400	121.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Pelayanan	Tersedianya data Pelaksanaan HAM di Kabupaten Soppeng	Kab. Soppeng	1	66.550.000	APBD	Bag. Hukum	1	73.205.000
4.4.12	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya Pengembangan Kapasitas Kinerja Pelayanan Publik		100	450.832.287			100	386.332.287
	- Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik	Terpenuhinya Standar Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat.	Kec. Lalabata	37	50.832.287	APBD	Bag. Ortala	37	50.832.287
	- Penguatan Kinerja Pelayanan Publik	Perda, Perbup Pelayanan Publik	Kec. Lalabata	2	70000000		Bag. Ortala	0	0
	- Penilaian Kinerja Pelayanan Publik	UKPP yang bersyarat untuk di nilai	Kec. Lalabata	2	60000000		Bag. Ortala	2	63000000
	- Inovasi Pelayanan Publik	Terlaksananya kompetisi inovasi pelayanan publik	Kec. Lalabata	6	50000000		Bag. Ortala	6	52500000
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah SKPD/Dokumen	Kab. Soppeng	1	220.000.000	APBD	Bag. Ortala	1	220.000.000
5	NON URUSAN								
5.1.1	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu		100	6.074.756.155			100	6.592.308.838
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	Watansoppeng	45	330.000.000	APBD	Humas dan Protokol	50	363.000.000
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Mengikuti rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	Luar Daerah, Watansoppeng	325	385.000.000	APBD	Humas dan Protokol	350	423.500.000
	- Penyediaan Operasional Mess Pemda Jakarta	Jumlah Petugas Operasional Mess Pemda yang Terbayarkan	Jakarta	5	200.750.000	APBD	Humas dan Protokol	6	220.825.000
	- Penyediaan Jasa Perkantoran	Realisasi jasa perkantoran	Kec. Lalabata	21	185.229.325	APBD	Bag. Ortala	21	113.829.325
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselesaikannya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Kec. Lalabata	32 Org	446.534.880	APBD	Bag. Keuangan	32 Org	491.188.368

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Soppeng	12	990.000.000	APBD	Bag. Umum	12	1.089.000.000
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercapainya Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas	Kab. Soppeng	65 Unit	60.830.000	APBD	Bag. Umum	69 Unit	66.913.000
	- Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan dan Keindahan Kantor	Kab. Soppeng	12	236.115.000	APBD	Bag. Umum	12	259.726.500
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan dan Peralatan Listrik Lainnya	Kab. Soppeng	12	165.000.000	APBD	Bag. Umum	12	181.500.000
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biaya Pengisian Tabung Gas	Kab. Soppeng	273 Buah	47.894.000	APBD	Bag. Umum	307 Buah	52.683.400
	- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Soppeng	12	1.795.402.950	APBD	Bag. Umum	12	1.974.943.245
	- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati	Tersedianya Makan dan Minum Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati	Kab. Soppeng	12	1.122.000.000		Bag. Umum	12	1.234.200.000
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati	Kab. Soppeng	2	110.000.000	APBD	Bag. Umum	2	121.000.000
5.1.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Presentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran		100	4.726.345.150			100	5.198.979.665
	- Pemeliharaan Rutin Berkala - Peralatan Studio	Jumlah Peralatan yang dipelihara	Watansoppe ng	6	28.600.000	APBD	Humas dan Protokol	8	31.460.000
	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor Setda	Kab. Soppeng	2	297.000.000	APBD	Bag. Umum	2	326.700.000
	- Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan	Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan	Kab. Soppeng	2	244.003.100	APBD	Bag. Umum	2	268.403.410
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Kab. Soppeng	3	500.000.000	APBD	Bag. Umum	3	550.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Gedung Kantor	Kab. Soppeng	7	300000000		Bag. Umum	7	330000000
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati	Kab. Soppeng	2 Unit	157.300.000	APBD	Bag. Umum	2 Unit	173.030.000
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas	Kab. Soppeng	3 Unit	110.000.000	APBD	Bag. Umum	3 Unit	121.000.000
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kab. Soppeng	4	200.000.000	APBD	Bag. Umum	4	220.000.000
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terwujudnya Pemeliharaan Mobil Jabatan Bupati dan Wakil Bupati	Kab. Soppeng	2 Unit	571.742.050	APBD	Bag. Umum	2 Unit	628.916.255
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terwujudnya Pemeliharaan Mobil Dinas/Operasional	Kab. Soppeng	80 Unit	1.655.500.000	APBD	Bag. Umum	87 Unit	1.821.050.000
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Tangga Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati	Terpeliharanya Peralatan Rumah Tangga Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati	Kab. Soppeng	2	104.500.000	APBD	Bag. Umum	2	114.950.000
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Kab. Soppeng	3	117.700.000	APBD	Bag. Umum	3	129.470.000
	- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Tercapainya Perbaikan Atap Rumah Dinas Sekda	Kab. Soppeng	-	220.000.000	APBD	Bag. Umum	-	242.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman,Taman,Pagar,Tempat Parkir	Tercapainya Fasilitas Tempat Parkir Kantor Bupati	Kab. Soppeng	-	220.000.000	APBD	Bag. Umum	-	242.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.3	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR	Persentase PNS berkinerja baik		100	358.826.872			100	400.193.549
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terwujudnya Pakaian Bupati dan Wakil Bupati	Kab. Soppeng	37 Paket	101.750.000	APBD	Bag. Umum	37 Paket	111.925.000
	- Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah aparat	Kec. Lalabata	152	50.000.000	APBD	Bag. Ortala	152	52.500.000
	- Administrasi Kepegawaian	Tercatatnya data/administrasi kepegawaian Setda	Kec. Lalabata	152	79839900		Bag. Ortala	152	95807880
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangpundangan	Jumlah orang yang ikut Bimtek	Kec. Lalabata	18	127.236.972	APBD	Bag. Ortala	18	139.960.669
5.1.4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu		100	270.792.755			100	297.872.031
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya RENSTRA dan RENJA Sekretariat Daerah	Kec. Lalabata	1 dok	35.253.900	APBD	Bag. Adm. Pembangunan	1 dok	38.779.290
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyelesaian RKA, DPA, DPPA Tepat Waktu	Kec. Lalabata	3 Dok	86.518.410	APBD	Bagian Keuangan	3 Dok	95.170.251
	- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Lalabata	2 Dok	40.751.692	APBD	Bagian Keuangan	2 Dok	44.826.862
	- Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Terbayarnya honor pengelola Manajemen Aset/Barang Daerah Setda	Kec. Lalabata	13	108.268.753	APBD	Bagian Keuangan	13	119.095.628

## BAB IV PENUTUP

Sebagai suatu pedoman dasar dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 1 (Satu) tahun mendatang yang memuat perencanaan yang sistematis, terukur dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, Rencana Kerja (RENJA SKPD) Sekretariat Daerah juga merupakan dasar dan acuan dalam mengevaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja yang bersifat tahunan.

Renja Sekretariat Daerah disusun dengan harapan agar semua unsur yang ada pada Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng maupun semua SKPD yang ada pada Lingkup Pemkab. Soppeng tidak hanya sebagai tim kerja yang terintegrasi, bersinergi dan sistematis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya namun lebih dari itu diharapkan dapat bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan perubahan yang terus terjadi dan kadang sifatnya tak terduga.

Semoga RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng ini dapat memberikan masukan dan sumbangsih yang berarti bagi pencapaian tujuan dan cita-cita luhur yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng pada periode Tahun 2017.

Watansoppeng,

SEKRETARIS DAERAH,



**Ir. H. SUGIRMAN DJAROPI, MS.**

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip. : 19570715 198303 1 032